

**SKRIPSI**  
**PERUBAHAN POLITIK ELEKTORAL DAN STRATEGI**  
**MENGHADAPINYA (STUDI KASUS PARTAI NASIONAL DEMOKRAT**  
**(NASDEM) DALAM MENGHADAPI PEMILIHAN LEGISLATIF 2019)**



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana Ilmu Politik Pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu  
Sosial dan Ilmu Politik

Oleh :

**MUH. FICHRİYADI HASTIRA**

**E 111 15 505**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK**  
**DEPARTEMEN ILMU POLITIK**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**

**2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**SKRIPSI**  
**PERUBAHAN POLITIK ELEKTORAL DAN STRATEGI**  
**MENGHADAPINYA (STUDI KASUS PARTAI NASIONAL DEMOKRAT**  
**(NASDEM) PADA PILEG 2019)**

Di susun oleh :

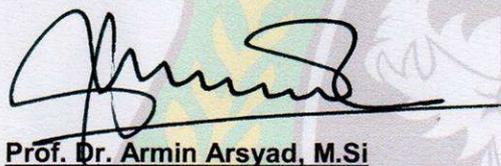
**MUH. FICHRIYADI HASTIRA**  
**E 111 15 505**

Telah diujikan dan dinyatakan memenuhi syarat

Pada tanggal : 28 Juli 2020

**Menyetujui :**

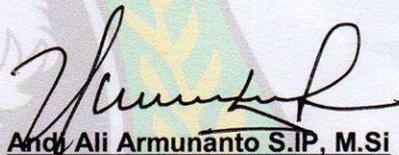
**Pembimbing I**



Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si

**NIP. 19651109191031008**

**Pembimbing II**



Andi Ali Armunanto S.IP, M.Si

**NIP. 198011142008121003**

**Mengetahui :**

**Ketua Departemen Ilmu Politik**



Drs. H.A. Yakub, M.Si. P. hD

**NIP. 196212311990031023**

**LEMBAR PENERIMAAN  
SKRIPSI  
PERUBAHAN POLITIK ELEKTORAL DAN STRATEGI  
MENGHADAPINYA (STUDI KASUS PARTAI NASIONAL DEMOKRAT  
(NASDEM) PADA PILEG 2019)**

Di susun dan diajukan oleh :

**MUH. FICHRIYADI HASTIRA**

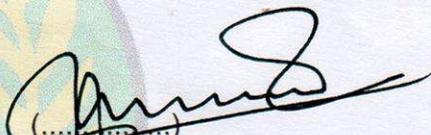
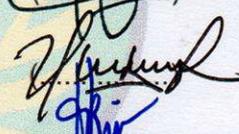
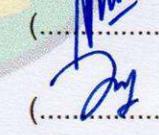
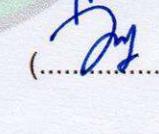
**E 111 15 505**

dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi  
pada Program Studi Ilmu Politik  
Departemen Ilmu Politik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui,

**PANITIA UJIAN**

Ketua : Prof. Dr. Armin, M.Si  
Sekretaris : A. Ali Armunanto, S.IP., M.Si  
Anggota : Dr. Ariana, S.IP., M.Si  
Anggota : Ummi Suci Fathia. B, S.IP., M.IP

  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH. FICHRIYADI HASTIRA

NIM : E11115505

Jenjang Pendidikan : Strata-1 (S1)

Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Perubahan Politik Elektoral dan Strategi Menghadapinya (Studi Kasus : Partai Nasional Demokrat Dalam Menghadapi Pileg 2019)”** adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 28 Juli 2020



(MUH. FICHRIYADI HASTIRA)

## ABSTRAK

**Muh. Fichriyadi Hastira. NIM E111 15 505. Perubahan Politik Elektoral dan Strategi Menghadapinya (Studi Kasus : Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Dalam Menghadapi Pileg 2019). Di bawah bimbingan Prof. Dr. Armin, M.Si. Dan Andi Ali Armunanto. S.IP, M.Si.**

---

Era revolusi industri 4.0 mengakibatkan berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi secara pesat. Internet merupakan teknologi yang paling banyak digunakan oleh penggunanya yang disebut dengan netizenship. Seiring berkembangnya pengguna internet berimplikasi pada menghilangkannya sekat-sekat ruang dan waktu. Teknologi informasi dan komunikasi berupa internet telah melahirkan ruang publik baru yang dikenal dengan sebutan *cyberspace*. Munculnya *cyberspace* dimanfaatkan sebagai sebuah strategi baru dalam berpolitik khususnya pemilihan legislatif. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Provinsi Sulawesi Selatan memanfaatkan perkembangan yang sedang terjadi menjadi sebuah kekuatan dalam memenangkan pemilihan.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kebijakan yang diambil oleh partai politik dan strategi apa yang digunakan dalam pemanfaatannya terhadap media sosial. Penulis juga melakukan penelitian studi kasus dengan dasar penelitian kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan mewawancarai informan kunci yang dianggap dapat menjelaskan kebijakan dan strategi yang digunakan oleh partai Nasdem pada pileg 2019 serta melengkapinya dengan beberapa referensi tertulis seperti data-data dari instansi terkait. Adapun pendekatan dan konsep yang digunakan ialah pendekatan Rational choice, konsep partai politik, strategi politik, dan konsep internet sebagai ruang publik baru.

Dalam hasil penelitian ini menjelaskan munculnya *digital society* berkaitan dengan penggunaan media sosial yang massif dalam masyarakat. Fenomena ini tanggap sangat baik oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Sulawesi Selatan untuk Menyusun berbagai strategi dalam hal pemanfaatan media sosial seperti, mempertimbangkan dalam memilih calon anggota legislatif yang terbiasa dengan teknologi, mengadakan pelatihan berbasis pemanfaatan media sosial bagi calon legislatif. Penggunaan media sosial yang terencana dan dikelola dengan baik. Memberikan dampak yang cukup besar dalam peningkatan suara calon legislatif.

*Kata kunci : Media Sosial, Partai Nasdem, Strategi, Pileg 2019.*

## **ABSTRACT**

**Muh. Fichriyadi Hastira. NIM E111 15 505. Changes in Electoral Politics and Strategies to Face Them (Case Study: Democratic National Party (Nasdem) in Facing 2019 Pileg). Under the guidance of Prof. Dr. Armin, M.Sc. And Andi Ali Armunanto. S.IP, M.Sc.**

---

*The era of the industrial revolution 4.0 resulted in the rapid development of communication and information technology. The internet is the technology most widely used by users called netizen. As the development of internet users has implications for the removal of barriers of space and time. Information and communication technology in the form of the internet has given birth to a new public space known as cyberspace. The emergence of cyberspace is used as a new strategy in politics especially in legislative elections. The Democratic National Party (Nasdem) of South Sulawesi Province took advantage of the development that was happening to become a force in winning the election.*

*This study aims to describe the policies taken by political parties and what strategies are used in their use of social media. The author also conducts case study research on the basis of qualitative research. Data is collected by interviewing key informants who are considered to be able to explain the policies and strategies used by the Nasdem party in the 2019 legislative election and complete it with some written references such as data from related institutions. The approach and concept used are the Rational choice approach, the concept of political parties, political strategy, and the concept of the internet as a new public space.*

*In the results of this study explain the emergence of digital society associated with the use of massive social media in society. This phenomenon has been responded very well by the National Democratic Party (Nasdem) of South Sulawesi to formulate various strategies in terms of the use of social media such as, considering choosing candidates for legislators who are familiar with technology, conducting training based on the use of social media for legislative candidates. Use of social media that is well planned and managed. Gives a big impact in increasing the votes of legislative candidates.*

*Keywords: Social Media, Nasdem Party, Strategy, 2019 Pileg.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu Alaikum Wr.Wb*

*Alhamdulillahirobbil a'alamin*, Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT., karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul **“Perubahan Politik Elektoral dan Strategi Menghadapinya (Studi Kasus : Partai Nasdem Dalam Menghadapi Pemilihan Legislatif 2019”**. Tak lupa Shalawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan Rasulullah Muhammad SAW atas pelajaran berharganya tentang pentingnya sabar dan tak kenal menyerah di tengah banyaknya rintangan dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan yang dikarenakan atas keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan banyak kritik dan saran demi penyempurnaan tulisan ini yang kiranya kelak dapat bermanfaat dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Begitu banyak rintangan, gangguan, dan ujian yang penulis hadapi selama menyusun skripsi ini hingga pada tahap ujian akhir. Namun berkat adanya bantuan dukungan, dorongan, do'a, serta semangat dari berbagai pihak yang mengiringi perjalanan penulis. Dan melalui kata pengantar ini, izinkan penulis untuk mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk semua pihak tanpa terkecuali atas segala bantuannya.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas keberhasilan penulis dalam penyusunan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda **Ir. Ibrahim Suanda** dan Ibunda **Parmiati, S.Pd.i, M.Pd.i** yang senantiasa memberikan doa, mencurahkan seluruh kasih sayang dan menjadi penyemangat bagi penulis.
2. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
3. Bapak **Prof. Dr. Armin, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
4. Bapak **Drs. H. A. Yakub, M.Si, P.hD** selaku Ketua Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
5. Bapak **Prof. Dr. Armin. M.Si**, selaku pembimbing I dan bapak **Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si** selaku Pembimbing II yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
6. Seluruh dosen pengajar **Prof. Muhammd, M.Si, M.Si; Prof. Basir Syam, M.Ag; Dr. Imran M.Si, Dr Muhammad Saad, MA;**

H. A. Yakub, M.Si, Ph.D; Dr. Phil. Sukri, M.Si; Dr. Ariana Yunus, S.IP, M.Si; Dr. Gustiana A. Kambo S.IP, M.Si, A. Naharuddin, S.IP, M.Si; S.IP, M.Si; Endang Sari, S.IP, M.Si; Ummi Suci Fathiah B, Zulhajar, S.IP, M.Si; S.IP, M.IP; Hariyanto, S.IP, M.A; dan Sakinah Nadir S.IP, M.Si, terima kasih atas pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini serta atas kuliah-kuliah inspiratifnya.

7. Seluruh staf pegawai Departemen Ilmu Politik, yang senantiasa memberikan arahan dalam pengurusan berkas.
8. **Keluarga Besar Himapol FISIP Unhas** yang tidak bisa saya sebutkan namanya, terima kasih atas dukungan dan dorongannya selama penulis memimpin lembaga. Tanpa Himapol, penulis tidak akan bisa seperti ini. Terima kasih.
9. **Kawan seperjuangan di Kema FISIP Unhas**, yang senantiasa memberikan arahan dan masukannya.
10. Lembaga-lembaga kemahasiswaan yang memberikan banyak pengalaman bagi penulis **Racana Gerakan Pramuka Unhas, Indonesia Development Engineering and Consultan (IDEC), Drum Corps Unhas, HIPMI Pare, UKM Volley Ball FISIP Unhas.**

11. Kepada teman-teman, rekan-rekan **KKN Kecamatan Turikale di Kabupaten Maros gelombang 99**. Terima kasih atas kerja sama, kebersamaan, waktu, dan kenangan selama KKN.
  
12. Terima kasih juga tidak lupa penulis ucapkan kepada para informan atas segala waktu yang diluangkan serta atas keterbukaan kepada penulis, sehingga penulis memperoleh informasi yang penulis butuhkan.

Selebihnya terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh teman-teman yang terlupa dan tak bisa penulis tuliskan satu-persatu, sesungguhnya kalian tetap teringat sebagai catatan akhir kuliah di kehidupan kemahasiswaan penulis. Akhirnya penulis menyadari atas segala keterbatasan, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Sekian dan terima kasih.

**Makassar, 28 Juli 2020**

**Penulis,**

**MUH. FICHRİYADI HASTIRA**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 <i>Rational Choice</i> (Pilihan Rasional).....	10
2.2 Politik Elektoral .....	13
2.3 Partai Politik.....	16
2.3.1 Peran Fungsi Partai Politik.....	18
2.4 Internet Sebagai Ruang Publik .....	21
2.5 Strategi Politik.....	27
2.6 Telaah Pustaka .....	32
2.7 Kerangka Pemikiran.....	34
2.8 Skema Berpikir.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
3.1 Lokasi Penelitian.....	37

3.2	Tipe dan Dasar Penelitian.....	37
3.2.1	Tipe Penelitian .....	37
3.2.2	Dasar Penelitian.....	38
3.3	Jenis Penelitian.....	38
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.5	Tekhnik Analisis Data .....	42
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>		<b>44</b>
4.1	Sulawesi Selatan .....	44
4.1.1	Jumlah Penduduk Sulawesi Selatan.....	45
4.1.2	Jumlah Daftar Pemilih Tetap Sulawesi Selatan.....	46
4.1.3	Pembagian Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.....	48
4.2	Sejarah Partai Nasional Demokrat (Nasdem) .....	50
4.2.1	Visi Misi Partai Nasional Demokrat (Nasdem).....	51
4.3	Gambaran Umum DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan..	53
<b>BAB V STRATEGI PARTAI NASDEM MENINGKATKAN SUARA</b>		<b>58</b>
5.1	Internet Sebagai Media Kampanye Partai Nasdem .....	58
5.2	Menjaring Caleg yang Menguasai Teknologi.....	69
5.3	Mengadakan Bimtek Pemanfaatan Teknologi. ....	72
5.4	Kampanye Media Sosial oleh Calon Legislatif.....	75
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>		<b>85</b>

6.1	Kesimpulan.....	85
6.2	Saran.....	86
	DAFTAR PUSTAKA.....	87
	DOKUMENTASI.....	91

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Akun Instagram Partai Nasdem Sulsel.....	62
Gambar 2. Halaman Facebook Partai Nasdem Sulsel.....	62
Gambar 3. Website Partai Nasdem .....	63
Gambar 4. Salah Satu Akun Calon Anggota Legislatif.....	77
Gambar 5. Salah Satu Iklan Facebook yang dibuat dengan fitur Facebook ads .....	78
Gambar 6. Salah Satu Iklan yang Dibuat Dengan Fitur Facebook Ads dan diteruskan ke Instagram.....	78
Gambar 7. Pengaturan Iklan yang Akan Dibuat.....	79
Gambar 8. Data Perkembangan Interaksi Iklan .....	81
Gambar 9. Data Jangkauan Iklan .....	82

## DAFTAR TABEL

Tabel. 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan .....	45
Tabel. 4.2 Jumlah Daftar Pemilih Tetap Berdasarkan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan .....	47
Tabel. 4.3 Pembagian Kursi dan Dapil DPRD Sulawesi Selatan .....	49
Tabel. 4.4 Daftar Ketua DPD Nasdem di 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan .....	56
Tabel. 5.1 Jumlah Perolehan Suara Nasdem pada Pileg 2014 dan 2019 di Sulsel .....	83

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dunia telah mengalami empat tahapan revolusi, yaitu: 1) Revolusi Industri 1.0 terjadi pada abad ke 18 melalui penemuan mesin uap, sehingga memungkinkan barang dapat diproduksi secara massal, 2) Revolusi Industri 2.0 terjadi pada abad ke 19-20 melalui penggunaan listrik yang membuat biaya produksi menjadi lebih murah, 3) Revolusi Industri 3.0 terjadi pada tahun 1970-an melalui penggunaan komputerisasi, dan 4) Revolusi Industri 4.0 sendiri terjadi pada tahun 2010-an melalui rekayasa intelegensi dan *internet of thing* sebagai tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin.<sup>1</sup>

Revolusi Industri 4.0 secara fundamental mengakibatkan berubahnya cara manusia berpikir, hidup, dan hubungan satu dengan yang lain. Era ini memunculkan *disruption*<sup>2</sup> berbagai aktivitas manusia dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam bidang teknologi saja, namun juga bidang yang lain seperti sosial, budaya dan politik. Tidak ada masyarakat yang tidak mengalami perubahan. Walaupun itu terjadi secara tidak disadari.

Perubahan sosial yang dipicu lahirnya revolusi industri 4.0 menyentuh banyak segmen bidang tak terkecuali bidang politik. Ini bisa

---

<sup>1</sup> Untuk pembahasan lebih lanjut, lihat Shwab, K. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*. New York: Crown Business.

<sup>2</sup> Catatan terjemahan : Disruption diartikan sebagai kekacauan dalam buku terjemahan Francis Fukuyama, *The Great Disruption* hakikat manusia dan rekonstruksi tatanan sosial, Yogyakarta, Qalam, 2014.

dilihat dari fenomena politik yang terjadi hari ini. Indonesia sedang terjadi ledakan partisipasi politik. Tampak dari naiknya penggunaan media sosial seperti *facebook*, *twitter*, *instagram*, dan lainnya, yang berkaitan dengan konten politik. Ledakan ini tidak dapat dipisahkan dari kemunculan revolusi industri 4.0 yang menghadirkan masyarakat digital atau *digital society*.

Sekitar 64% atau sekitar 171,17 juta masyarakat Indonesia terhubung dengan internet.<sup>3</sup> Berdasarkan riset *Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia*, pengguna internet di Indonesia tumbuh 10,12 persen dari 2018.<sup>4</sup> Ibukota Sulawesi Selatan menjadi salah satu pengguna internet tertinggi di Indonesia. Sulawesi Selatan tingkat penetrasi pengguna internetnya sekitar 44 persen atau sekitar 3,7 juta masyarakat aktif menggunakan internet dari jumlah penduduk Sulawesi Selatan sebanyak 8.771.970 Jiwa.<sup>5</sup> Data ini sejalan dengan semakin banyaknya konten politik yang muncul di media sosial dan semakin banyaknya orang di media sosial saling berkomentar tentang politik.

Digitalisasi atau *digital society* telah membuka medium yang sangat luas bagi aktivitas politik dan demokrasi hal ini yang harus dimanfaatkan oleh partai politik saat ini. Kepercayaan masyarakat Indonesia dengan partai politik sangat rendah berdasarkan hasil rilis survei lembaga Indikator Politik pada Januari 2016 tingkat kepercayaan masyarakat

---

<sup>3</sup> Buletin APJII, Edisi 40 - Mei 2019, Hlm 1

<sup>4</sup> Buletin APJII, Loc.cit.

<sup>5</sup>Diakses pada laman <https://tekno.tempo.co/read/700893/pengguna-internet-di-sulawesi-selatan-37-juta-orang/full&view=ok> pada tanggal 28 Februari 2019 pukul 23.14 Wita

kepada partai politik sebesar 39.2%.<sup>6</sup> Data ini hampir sama dengan hasil survei yang dikeluarkan oleh lembaga survei Poltracking Indonesia yang menunjukkan 28% masyarakat tidak percaya dengan partai politik saat ini<sup>7</sup>. Data ini harusnya menjadi acuan untuk partai politik dalam memperbaiki citranya terhadap masyarakat dan melalui *digital society* menjadi peluang partai politik memberikan informasi dalam bentuk yang se-menarik mungkin untuk mengambil simpati masyarakat.

Kehadiran *digital society* menjadi tantangan tersendiri bagi partai politik. Fenomena yang muncul di masyarakat ini mulai dimanfaatkan oleh salah satu dari 16 partai politik nasional yang mengikuti pemilihan legislatif 2019 yakni, Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Pada pemilihan legislative 2014 yang lalu, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) merupakan partai pendatang baru. Pemilihan legislative 2014 merupakan pemilihan umum pertama yang diikuti oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem) walaupun tergolong partai baru, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) berhasil menempati posisi delapan besar peroleh suara tertinggi pada pemilihan legislative 2014. Dengan mendudukkan 35 anggota dewan di DPR-RI periode 2014-2019 atau sebanyak 8.402.812 masyarakat Indonesia memberikan hak pilihnya untuk memilih Partai Nasional Demokrat (Nasdem).<sup>8</sup> Hasil ini merupakan pencapaian yang terbilang sukses untuk sebuah partai baru yang berhasil menempatkan dirinya

---

<sup>6</sup>Data rilis survei, Indikator Politik, Revisi UU KPK dan pertaruhan modal Jokowi, 18-29 Januari 2016. Hal 11. Diakses pada tanggal 7 Januari 2019 pukul 19.31 Wita

<sup>7</sup> Data rilis survei, Poltracking Indonesia, Evaluasi pemerintahan Jokowi-JK meneropong peta electoral 2019, 8-15 November 2017. Hal 36. Diakses pada tanggal 7 Januari 2019 pukul 19.39 Wita

<sup>8</sup> Diakses pada laman [https://id.wikipedia.org/wiki/Partai\\_NasDem](https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_NasDem). Tanggal 08 Spetember 2019. Pukul 21.59 Wita.

diposisi papan tengah dan bersaing dengan partai-partai yang sudah beberapa kali mengikuti pemilihan umum.

Pemilihan legislative 2019 Partai Nasional Demokrat (Nasdem) juga berhasil meningkatkan perolehan kursinya di DPR-RI periode 2019-20124. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) berhasil memperoleh jumlah suara 12.661.792 dengan berhasil mendudukkan sebanyak 59 anggota dewan atau peningkatan 24 kursi dari hasil pemilihan legislative 2014.<sup>9</sup> Dengan hasil ini Partai Nasional Demokrat (Nasdem) berhasil memperoleh posisi 5 besar perolehan suara tertinggi pada pemilihan legislative 2019. Peningkatan suara Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ditingkat pusat ini juga berbanding lurus dengan peningkatan suara Partai Nasional Demokrat (Nasdem) di beberapa daerah di Indonesia. Salah satu yang menunjukkan peningkatan yang signifikan adalah Provinsi Sulawesi Selatan.

Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sebagai partai pendatang baru dalam kontestasi politik di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal ini terlihat dalam pemilihan legislative DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) berhasil mengumpulkan 371.343 suara dan memperoleh 7 kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.<sup>10</sup> Dengan perolehan suara Partai Nasional Demokrat (Nasdem) membuat partai ini mendapatkan salah satu dari 5 kursi pimpinan di DPRD Provinsi Sulawesi

---

<sup>9</sup> Ibid. Diakses pada tanggal 08 Spetember 2019. Pukul 22.26 Wita.

<sup>10</sup>Diakses pada laman <https://makassar.tribunnews.com/2014/05/12/golkar-raih-suara-terbanyak-untuk-dprd-sulsel> pada tanggal 08 September 2019 pukul 22.47 Wita.

Selatan. Suatu pencapaian yang cukup baik untuk partai yang baru pertama kali mengikuti pemilihan umum.

Hasil positif yang diperoleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem) pada pemilihan legislative 2014 berlanjut di pemilihan legislative 2019. Pada pemilihan legislative 2019 yang diikuti oleh 16 partai politik nasional, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) berhasil memperoleh suara 564.642 pada pemilihan legislative DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil ini sama dengan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) memperoleh 12 kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan perolehan 12 kursi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) berhasil naik ke posisi kedua perolehan suara tertinggi setelah Partai Golkar dengan 13 kursi dan berhak menempati posisi pimpinan wakil ketua di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.<sup>11</sup>

Perolehan suara Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dari dua pemilihan legislative yang telah diikuti menunjukkan hasil yang sangat positif. Perolehan suara ini tentunya tidak serta merta di peroleh begitu saja. Setiap partai politik dalam menghadapi pemilihan umum pasti menggunakan strategi dalam memenangkan kontestasi politik yang diikutinya. Hal ini juga berlaku untuk Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Berkembangannya internet memberikan strategi baru dan cara baru untuk partai politik dalam berkampanye. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) telah menyadari fenomena ini. Pemanfaatan media social telah dilakukan

---

<sup>11</sup> Diakses pada laman <https://sulse.idntimes.com/news/sulse/aanpranata/kpu-tetapkan-85-anggota-dprd-sulse-terpilih-ini-daftarnya/full> pada tanggal 08 September 2019 pukul 23.27 Wita.

oleh beberapa calon anggota legislative DPRD provinsi Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Ini dapat dilihat dari calon-calon legislative Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang banyak menggunakan media social dalam berkampanye. Para calon legislative Partai Nasional Demokrat (Nasdem) banyak menggunakan media social *Instagram* dan *facebook* dalam mempromosikan dirinya di media social.

Beberapa calon legislative Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang aktif menggunakan media social ialah sekretaris jendral Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Syaharuddin Alrif, S.IP yang aktif di media social *Instagram* untuk mempromosikan dirinya. Selain itu ada juga calon legislatif dapil 1 Drg. Rachmatika Dewi yang juga lebih banyak memanfaatkan media social *Instagram* dalam menjangkau pemilihnya. Dari dapil 2 juga memanfaatkan media social dalam mempromosikan dirinya kepada masyarakat ialah Rezki Mulfiati Lutfi. Calon legislative Sarwindye Biringkanae juga banyak melakukan promosi dirinya di media social berbeda dari 3 calon legislatif lain yang banyak menggunakan *Instagram* sebagai media utamanya, Sarwindye Biringkanae lebih banyak menggunakan media social *facebook*. Penggunaan media social sebagai strategi baru dalam berkampanye menjadi prioritas salah satu calon legislatif Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dapil 1 Andre Prasetyo Tanta, ia memprioritaskan penggunaan media social dalam mempromosikan dirinya sebagai calon anggota legislatif.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Data diakses pada laman <http://beritakotamakassar.fajar.co.id/berita/2019/03/01/satu-partai-beda-strategi/> pada tanggal 10 September 2019 pukul 22.26 Wita

Penggunaan media social ini adalah sebuah langkah strategi yang coba dijalankan oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem) melalui calon legislatifnya yang berlaga di pemilihan legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 2019-2024. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) memiliki mayoritas calon anggota legislatif yang tergolong muda. Satu factor Partai Nasional Demokrat (Nasdem) memilih calon legislatif yang relative umurnya masih muda sebab dalam pemahamannya mengenai perkembangan teknologi tergolong cepat dalam penggunaan teknologi yang ada.

Demokratisasi hari ini telah banyak digerakkan oleh internet khususnya di media sosial. Proses politik hari ini tidak hanya bisa difokuskan dengan cara-cara konvensional melainkan juga harus melalui media sosial. Kecenderungan politik ini ditandai dengan tren global dalam mewujudkan demokrasi partisipatoris. Sehingga transformasi politik terhubung ke internet dan memberikan akses yang bersifat personal dan bias juga menjangkau banyak masyarakat dalam kurung waktu yang singkat dan efisien. Dalam konteks ini, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) berusaha mengikuti perubahan yang ada untuk mengumpulkan suara. Dimulainya perkembangan teknologi memunculkan *digital society* sebagai media baru dalam berpolitik. Fenomena baru ini memberikan ruang baru dalam berkampanye telah dimanfaatkan oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dalam memenangkan pemilihan legislatif 2019.

Hal ini yang menarik penulis meneliti bagaimana Partai Nasional Demokrat (Nasdem) menghadapi perubahan politik elektoral yang diakibatkan oleh munculnya masyarakat digital dengan judul: **“Perubahan Politik Elektoral dan Strategi Menghadapinya (Studi Kasus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dalam Menghadapi Pemilu Legislatif 2019)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah, bagaimana strategi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) meningkatkan suara dalam pileg 2019 dapil 1 dan 2 DPRD Prov. Sulawesi Selatan ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara umum peneliti bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis strategi yang dilakukan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) meningkatkan suara dalam pileg 2019 dapil 1 dan 2 DPRD Prov. Sulawesi Selatan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah :

### **1.4.1 Manfaat Akademis**

- a. Bahan informasi ilmiah untuk para peneliti lain yang ingin melihat strategi partai politik dalam meningkatkan suara dalam pileg.

- b. Penelitian ini dihubungkan menjadi salah satu bentuk sambungan pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang kepartaian.
- c. Memperkaya khasanah kajian ilmu politik dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para fungsionaris partai politik tentang strategi partai politik dalam meningkatkan suara dalam pileg.
- b. Bahan rujukan kepada masyarakat yang berminat dalam memahami realitas politik yang terjadi khususnya dalam partai politik.
- c. Acuan partai politik dalam mengambil langkah strategi politik untuk mengumpulkan suara.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka sangat penting untuk lebih memperjelas dan mempertegas penelitian dari aspek teoritis. Literatur-literatur yang berisi pendapat para ahli banyak digunakan untuk lebih menyempurnakan penelitian ini. Penelitian ini perlu mengungkapkan permasalahan secara komprehensif, maka dari itu penggunaan teori, pendekatan, dan konsep akan menjadi alat analisis serta landasan berpikir bagi peneliti untuk membedah dan memecahkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Berkaitan dengan itu, maka pembahasan pada bagian ini menjelaskan beberapa konsep, teori, ataupun pendekatan yang berhubungan dengan pelaksanaan penelitian ini. Bagian ini membahas mengenai Perubahan Politik Elektoral dan Strategi Menghadapinya (Studi Kasus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dalam Menghadapi Pemilu Legislatif 2019) secara tinjauan teoritis. Adapun konsep, pendekatan dan teori akan diuraikan lebih lanjut pada bab ini.

#### **2.1 *Rational Choice* (Pilihan Rasional)**

Kerangka teoritis dalam penelitian ini akan diawali dengan urgensi teori rational-choice dalam memahami ilmu politik khususnya pada studi kepartaian. Bahkan jika pendekatan pilihan rasional diumpamakan sebagai kandidat pemilu, maka kandidat ini akan menjadi front-runner dalam pemilu. Urgensi menggunakan pendekatan pilihan rasional dalam

studi partai politik tidak dapat dipungkiri lagi. Segala aktivitas yang berbau politik, senantiasa memiliki unsur politis dan dengan menggunakan rasionalitas penuh. Pada perjalanan keilmuannya, teori pilihan rasional muncul sebagai bagian dari revolusi *behavioral* dalam ilmu politik Amerika tahun 1950-an dan 1960-an yang sebenarnya berusaha meneliti bagaimana individu berperilaku dengan menggunakan metode empiris.

Teori ini telah menjadi pendekatan dominan terhadap ilmu politik, setidaknya di Amerika Serikat. Namun, pilihan rasional bersumber dari metodologi ilmu ekonomi, berkebalikan dengan para behavioralis yang bersumber dari sosiologi atau psikologi. Anthony Downs adalah pelopor dalam penerapan teori pilihan rasional bagi perilaku pemilihan umum dan persaingan antar partai, dan karyanya yang merevolusi studi pemilihan umum. Menurutnya, pemilihan suara individu, jika ia bisa naik ke kekuasaan maka diduga akan menghasilkan manfaat paling tinggi bagi mereka. Partai diasumsikan semata-mata termotivasi oleh keinginan untuk jabatan, memerebutkan suara dengan merubah landasan kebijakannya.<sup>13</sup> Selain Anthony Downs, ilmuwan politik lain yang mengungkapkan urgensi menggunakan teori pilihan rasional dalam analisis politik adalah Hugh Ward.

Melalui tulisannya yang berjudul *Rational Choice*, Hugh Ward berasumsi bahwa *rational-choice* adalah bagian tak terpisahkan dari perangkat analisa para ilmuwan politik, karena begitu banyak fenomena

---

<sup>13</sup> Marsh, David dan Gerry Stoker. (2010) *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*. Palgrave Macmillan : USA.

penting yang bisa dijelaskan, paling tidak secara parsial dari perspektif ini. Secara general, argumentasi tersebut berkenaan dengan pendapat Hershey<sup>14</sup> mengenai pendekatan pilihan rasional dalam menjelaskan perilaku politik. Teori ini menganggap bahwa individu akan mencoba untuk mencapai tujuan mereka melalui cara-cara yang instrumental dan efisien.

Praktiknya, penggunaan cara yang efisien dapat dipahami sebagai upaya individu untuk meningkatkan manfaat yang mereka harapkan, dengan sedikit mengeluarkan cost dalam bentuk apapun untuk memenuhi kebutuhannya. Pernyataan simpatik akan eksistensi *rational-choice theory* tersebut tidak berarti bahwa *rational-choice theory* memiliki posisi yang mapan dalam jagad diskursus ilmu politik. Meskipun diaplikasikan secara luas dalam berbagai area ilmu politik, banjir kritik dan prasangka dijatuhkan pada perspektif yang satu ini. Kritik yang dilontarkan pada teori ini sangat beragam, mulai dari kritik yang menyatakan bahwa *rational-choice theory* memiliki kecenderungan ideologi kanan sampai pada mereduksi manusia sekedar menjadi satu makhluk yang semata-mata digerakkan oleh nalar.

Terlepas dari berbagai kritik tersebut, Dunleavy menyatakan bahwa, adalah naif mengabaikan sebuah pendekatan sebagai perangkat analisa, yang memiliki kapasitas analisis dan eksplanasi sekuat *rational-choice theory*. Intisari dari *rational-choice* adalah ketika dihadapkan pada beberapa jenis tindakan, manusia biasanya akan melakukan apa yang

---

<sup>14</sup> Hershey, Marjorie Randon. (2006). *Political Parties as Mechanism of Social Science*, dalam Richard Katz dan William Crotty (ed), *Handbook of Party Politics*, SAGE Publication. Hal. 75.

mereka yakini akan mendatangkan manfaat yang paling besar bagi manusia tersebut. Pada konteks kepartaian, partai politik dapat dikatakan sebagai organisasi yang penuh dengan pertimbangan rasional. Pihak yang hendak bergabung dalam partai politik, biasanya mengharapkan manfaat perolehan sumber daya negara berikut akses negara yang lebih mudah.

Berdasarkan deskripsi di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa partai politik dideskripsikan sebagai sebuah organisasi yang terlembagakan, dan kerap berupaya memegang kendali atas pemerintah bagi pimpinan partainya, serta memberikan kemanfaatan bagi anggota partainya, terutama manfaat yang bersifat materil maupun idiil. Dari perspektif pilihan rasional, *rational-choice theory* tidak terkait dengan posisi ideologis partai tertentu. Melainkan, terdapat “keuntungan rasional” yang ditawarkan apabila menjadi bagian dari partai politik. Selain itu, terkait dengan penggunaan *rational-choice theory* dalam mengidentifikasi perilaku partai, penulis dapat menyimpulkan bahwa partai politik senantiasa melakukan segala upaya untuk memaksimalkan keuntungan partai maupun anggotanya.

## **2.2 Politik Elektoral**

Politik elektoral diartikan sebagai sala satu sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan. G.J. Wolhoff mendefinisikan pemilu dengan memulai dari

konsep demokrasi. Demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Pemerintahan untuk rakyat, dan oleh rakyat seluruhnya. Dalam negara demokrasi, rakyat secara keseluruhan ikut serta dalam pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung. Di dalam demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan rakyat memilih menurut salah satu sistem pemilihan untuk memilih wakil-wakilnya agar menjalankan atau turut serta dalam pemerintahan atas nama rakyat.<sup>15</sup> Istilah electoral sering dikaitkan dengan politik pemerintahan. Pengertian elektoral adalah pemilihan atau yang berkaitan dengan pemilihan. Elektoral dalam demokrasi dapat diartikan sebagai pemilihan umum (pemilu) yang diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat untuk memilih wakilnya di parlemen dan kepala pemerintahan. Politik elektoral dapat dimaknai sebagai sebuah sistem untuk membuat keputusan-keputusan politik dimana individu-individu mendapatkan kekuasaan untuk memutuskan melalui pertarungan kompetitif memperebutkan suara rakyat

Definisi lain dari Ramlan Surbakti mengatakan bahwa Pemilu sebagai instrumen dirumuskan sebagai: (1) mekanisme pendelegasian sebagian kedaulatan dari rakyat kepada peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat; (2) mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik, dan/atau

---

<sup>15</sup> Jurdi, Fajlurrahman, 2018. Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Jakarta: Kencana Hal. 2

mengenai sirkulasi elite, secara periodik dan tertib; dan (3) mekanisme pemindahan berbagai macam perbedaan dan pertentangan kepentingan dari masyarakat ke dalam lembaga legislatif dan eksekutif untuk dibahas dan diputuskan secara terbuka dan beradab.

Dalam politik, seseorang tidak hanya dituntut untuk mengembangkan pengetahuan, tetapi juga harus mengembangkan aspek sikap dan keterampilan. Perpaduan ketiga aspek tersebut menurut Crick disebut dengan melek politik "political literacy". Keberhasilan pendidikan politik tentunya akan melahirkan masyarakat yang melek politik yang nantinya akan mampu berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan politik dalam komunitasnya. Pendidikan politik tidak hanya dilaksanakan melalui pembelajaran di persekolahan saja, melainkan juga dapat dilakukan melalui proses sosialisasi politik seperti kegiatan kursus, latihan kepemimpinan, diskusi serta keikutsertaan dalam berbagai forum pertemuan. Proses sosialisasi politik ini haruslah dilakukan secara luas, melibatkan banyak orang, dan dilaksanakan secara dialogis-interaktif, bukan indoktrinatif. Efektifitas politik suatu bangsa berorientasi kepada semangat membangun bangsa sehingga setiap yang dilakukan baik dalam membuat kebijakan dan memilih pemimpin serta wakil rakyat selalu didasarkan pada perjuangan yang bertujuan kemakmuran rakyat dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh warganya. Praktek politik menunjukkan jika budaya politik di suatu negara telah matang diantaranya jika menghargai perbedaan antar kelompok, dewasa dalam persaingan dan

cara untuk memperoleh kekuasaan dicapai secara jujur dan adil serta mengedepankan moral sebagai budaya politik.

### **2.3 Partai Politik**

Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara demokrasi. Negara dijalankan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Organisasi negara pada hakikatnya dilaksanakan oleh rakyat sendiri atau setidaknya atas persetujuan rakyat karena kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, syarat utama pelaksanaan demokrasi adalah adanya lembaga perwakilan yang dibentuk melalui pemilihan berkala dan menghendaki adanya kebebasan politik agar pemilihan tersebut benar-benar bermakna.

Partai politik merupakan salah satu bentuk perwujudan kebebasan berserikat sebagai salah satu prasyarat berjalannya demokrasi. Kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi baik secara formal maupun informal. Kecenderungan demikian itu merupakan suatu keniscayaan. Kecenderungan bermasyarakat yang pada perinsipnya adalah kehidupan berorganisasi timbul untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang sama dari individu-individu serta untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan persamaan pikiran dan hati nurani.<sup>16</sup>

Partai politik adalah salah satu bentuk pengelompokan warga negara berdasarkan kesamaan pikiran dan kepentingan politik. Partai

---

<sup>16</sup> Ali Safa'at Muchamad, (2011), *Pembubaran Partai Politik Pengaturan dan praktik Pembubaran Partai Politik dalam pergulatan Republik*. Rajawali pers. Hal 4-5

politik sebagai organisasi yang terstruktur baru muncul pada 1830-an sebagai wujud perkembangan demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan. Perkembangan demokrasi telah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan bernegara. Sarana kelembagaan terpenting yang dimiliki untuk mengorganisasi perluasan peran serta politik tersebut adalah partai politik.<sup>17</sup> Miriam Budiardjo mengatakan bahwa partai politik adalah salah satu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.<sup>18</sup> Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Partai politik dalam perkembangannya telah menjadi penyalur kepentingan kelompok yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan satu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.<sup>19</sup>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 menjelaskan partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok WNI secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI

---

<sup>17</sup> Huntington Samuel P., (2003), *Tertib Politik di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*. Jakarta: raja grafindo persada. Halaman 472

<sup>18</sup> Miriam Budiardjo, (2008), *Dasar-dasar ilmu politik* halaman 160-161

<sup>19</sup> A Rahman H.I., (2007), *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: graha ilmu. halaman 102

berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan partai politik setidaknya paling sedikit terdiri dari 50 orang WNI yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris. Pendirian dan pembentukannya menyertakan 30% keterwakilan perempuan.

Partai dapat dipahami dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, partai adalah penggolongan masyarakat dalam organisasi secara umum yang tidak terbatas pada organisasi politik. Sedangkan dalam arti sempit, partai adalah partai politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak di bidang politik.<sup>20</sup> Sigmund Neuman dalam buku dasar-dasar ilmu politik mengartikan bahwa partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan satu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda. Dengan demikian, partai politik merupakan prantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi.

### **2.3.1 Peran dan Fungsi Partai Politik**

Partai politik tidak hanya bertugas sebagai merebut kursi dan mengumpulkan suara pada saat pemilihan umum, tetapi partai politik juga berfungsi sebagai solusi untuk kepentingan bersama. Artinya, partai politik juga berfungsi sebagaimana di sampaikan oleh para pemikir. Miriam Budiharjo, melihat peran partai politik setidaknya ada empat macam peran,

---

<sup>20</sup> Safa'at Ali Muchamad . Op. Cit, hlm 31

pertama sebagai sarana komunikasi politik artinya partai politik sebagai sarana agregasi kepentingan dan sarana permusuan kepentingan. Kedua, sebagai sarana sosialisasi politik, yaitu sarana bagi proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik dan untuk menciptakan citra bahwa dia memperjuangkan kepentingan umum. Ketiga, partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, fungsi ini berhubungan dengan perkaderan dan rekrutmen anggota legislatif maupun eksekutif, partai politik harus benar-benar mencari sosok yang profesional dan orang-orang yang punya integritas. Keempat, sebagai sarana pengatur konflik, karena masyarakat politik adalah masyarakat yang heterogen, yang tentunya selalu berbeda yang kemungkinan berpotensi konflik.<sup>21</sup>

Fungsi partai politik menurut UU no 31 tentang partai politik adalah sebagai sarana : a) pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. b) menciptakan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan berbangsa untuk mensejahterakan masyarakat. c) penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, partisipasi politik warga negara dan rekrutmen politik dalam proses

---

<sup>21</sup> Miriam Budiharjo, 2008, Dasar Dasar Ilmu Politik hal 405-409

pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Fungsi partai politik berdasarkan undang-undang partai politik di Indonesia yaitu, Undang – Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa partai politik adalah sebagai sarana :

- a. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat.
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Melekatnya beberapa fungsi dalam partai politik diatas, partai politik menjadi salah satu aktor penting bagi tegaknya negara demokrasi. Hal ini dikarenakan partai politik menjadi sarana mobilitas aspirasi masyarakat dan pemerintah. Selain itu, partai politik menjadi sarana informasi dalam memberikan penjelasan mengenai keputusankeputusan politik yang

diambil pemerintah. Secara ringkas partai politik dapat dikatakan sebagai penghubung antara warga negara dengan pemerintahnya. Selain itu partai juga melakukan fungsi-fungsi seperti komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, pengatur konflik politik, pendidikan politik, Pemersatu kebangsaan untuk mensejahterakan masyarakat, dan partisipasi politik. Pelaksanaan fungsi-fungsi ini dapat dijadikan instrumen untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan partai politik dalam menjalankan tugasnya.

#### **2.4 Internet Sebagai Ruang Publik**

Juergen Habermas mengatakan, ruang publik adalah ruang masyarakat privat (*sphere of private people*) yang berkumpul bersama menjadi sebuah publik. Pandangan Habermas tentang ruang publik sebenarnya terdiri dari dua gelombang. Gelombang pertama dijelaskannya dalam buku *The Structural Transformation of Public Sphere* (1989), sementara gelombang kedua dijelaskan lewat buku *Between Facts and Norms* (1992).

Buku pertama Jurgen Habermas, ruang publik dilihat lewat lensa historis-sosiologis. Di buku itu, dijelaskan dua tema pokok, yakni asal mula ruang publik borjuis dan analisis terhadap perubahan struktural ruang publik di abad ke-18 hingga ke-19. Secara historis, ruang publik pertama kali muncul di Eropa pada abad ke-17 bersamaan dengan berkembangnya kapitalisme yang mendorong munculnya kelas baru: Borjuis. Kelas ini muncul setelah mereka awalnya hanya melakukan kegiatan perdagangan biasa yang lalu berkembang menjadi produksi

kapitalis. Dengan latar seperti ini, ruang publik yang muncul di era tersebut adalah ruang publik borjuis, yaitu ruang publik yang diisi oleh kelompok-kelompok aristokratis dan para intelektual borjuis— kelompok terdidik yang memiliki kesamaan-kesamaan tertentu.<sup>22</sup>

Buku pertama itu pula, Habermas menyebutkan tiga kriteria ruang publik. Kriteria tersebut disarikannya dari kecenderungan yang terjadi dalam ruang publik berupa kedai kopi, salon, dan *tischgesellschaften*. Kriteria-kriteria itu adalah *Pertama, egaliter* atau kesetaraan status. Dalam ruang publik, status cenderung dikesampingkan atau dengan kata lain, bentuk hubungan sosial yang tercipta, jauh dari mengangankan kesetaraan status. Kesetaraan atau persamaan status ini, Dalam perkembangan selanjutnya, ruang publik tidak hanya termanifestasikan dalam ruang-ruang fisik seperti kedai kopi, salon, maupun *tischgesellschaften*, melainkan juga terwujud dalam media cetak.

*Kedua*, bebas dari dominasi dalam hal ini, ruang publik yang terwujud di salon, kedai kopi, dan *tischgesellschaften* di Eropa pada abad ke-17 hingga ke-19, pembicaraan yang berlangsung menyangkut permasalahan-permasalahan yang masuk dalam wilayah “kepedulian umum”. Namun pembicaraan-pembicaraan tersebut berlangsung dengan mengesampingkan dominasi atau otoritas dari gereja dan negara yang dalam konteks saat itu memegang monopoli terhadap segala interpretasi, baik dalam filsafat, sastra, seni, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya.

---

<sup>22</sup> Prasetyo, Antonius Galih. 2012. *Menuju Demokrasi Rasional: Melacak Pemikiran Jürgen Habermas Tentang Ruang Publik*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol.16 No.2 Hal.169-184.

*Ketiga*, inklusif dalam hal ini ruang publik, inklusivitas publik tercipta karena pada dasarnya setiap masalah yang diperbincangkan adalah persoalan-persoalan umum yang harus bisa dan mudah untuk diakses setiap orang. Dengan kata lain setiap orang harus sanggup berpartisipasi di dalamnya.

Konteks masyarakat Eropa yang dikaji oleh Habermas pada saat itu, ruang publik dalam media cetak awalnya terwujud dalam jurnal-jurnal khusus kritik seni dan budaya yang melembagakan kritik sastra dari orang-orang atau pribadi-pribat yang dianggap awam dalam hal seni dan sastra. Kritik-kritik seni (*Kunstrichter*) itu sendiri, meski diakui mengandung penilaian yang amatir, namun dapat dianggap sebagai perlawanan terhadap eksklusifnya seni dan sastra yang hanya dimonopoli kalangan bangsawan, keluarga kerajaan, borjuis, dan seniman. Jurnal-jurnal itulah yang kemudian menjadi dasar sehingga sampai kini, pers atau media massa, dianggap sebagai sebuah ruang publik. Sementara dalam buku keduanya *Between Facts and Norms* ruang publik ditempatkan sebagai elemen dari bangunan teoritis yang lebih komprehensif tentang demokrasi deliberatif yang merupakan varian dari demokrasi yang fokus pada isu legitimasi politik.

Model demokrasi deliberatif adalah arus balik dari demokrasi klasik ortodoks yang memahami demokrasi semata dalam kerangka agregasi preferensi dan kepentingan warga negara melalui sarana konvensional

seperti pemungutan suara dan lembaga perwakilan.<sup>23</sup> Inti dari demokrasi ini adalah bahwa sebuah keputusan akan terlegitimasi apabila telah mendapat persetujuan rasional lewat partisipasi di dalam pertimbangan mendalam (deliberation) yang otentik oleh semua pihak yang berkepentingan terhadap keputusan tersebut.

Kehadiran internet harus diakui telah menyebabkan berkembangnya konsep mengenai ruang publik. Dengan adanya internet, interaksi-interaksi yang membahas mengenai permasalahan public yang awalnya hanya berlangsung di ruang-ruang fisik dan di dalam kolom-kolom media cetak pada akhirnya berlangsung pula di dalam lingkungan virtual dengan menggunakan perantara komputer (*Computer Mediated Communication* atau CMC). Berdasarkan pemahaman itulah, maka Meyrowitz menyatakan bahwa penelitian komunikasi dalam konteks kekinian, seharusnya tidak lagi fokus pada pesan dan konten, tetapi juga kepada perkembangan teknologi yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat tersebut.<sup>24</sup>

Media disebut sebagai sarana untuk memberikan ruang kepada publik untuk berbicara meliputi surat kabar, televisi, radio, majalah, iklan, mural, karikatur, hingga perkembangan terbaru yaitu ruang maya (*cyberspace*). Jejaring komunikasi dalam *cyberspace*, entah itu lewat komputer atau telepon selular dewasa ini telah menunjukkan tingkat kepedulian tertentu terhadap persoalan-persoalan publik, sehingga

---

<sup>23</sup> Dryzek, John S. 2000. *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations*. New York: Oxford University Press. Hal. V.

<sup>24</sup> Meyrowitz, J. 1999. *Understandings of media. ETC: A Review of General Semantics*. Hal. 51.

*cyberspace* juga dapat menjadi salah satu jenis ruang publik dalam era teknologi informasi dan komunikasi kontemporer. Kemunculan *cyberspace* dianggap sebagai sesuatu yang berdampak besar pada partisipasi demokratis warga, sehingga turut memperluas pengertian ruang publik. Relasi antar individu pun tidak lagi terbatas pada relasi fisik, melainkan juga relasi interface yang diwakili oleh perangkat teknologi komunikasi. Bahkan, dalam perkembangan dunia siber saat ini, kehadiran individu sebagai obyek, tidak selalu menunjukkan wujud aslinya, namun bisa pula diwakili oleh avatar atau gambar-gambar tertentu yang dikehendakinya sendiri.

Perubahan yang sedemikian rupa membuat ruang publik tidak lagi hanya berlangsung dalam ruang-ruang fisik, namun juga dalam ruang-ruang virtual. Hal ini senada dengan pernyataan Papacharissi yang menyatakan bahwa media digital seperti internet, dengan infrastruktur yang menjajikan wacana tanpa batas serta aturan-aturan yang beroperasi di luar batas-batas geografis, akan mendorong terjadinya reinkarnasi virtual ranah publik.

Keberadaan *wall* atau dinding sebagai tempat pengguna menyampaikan ide dan gagasan, tidak bisa lantas dianggap sebagai upaya pengguna tersebut untuk menciptakan atau terlibat dalam debat kritis sebagaimana terjadi dalam ruang publik. Meski di "dinding" tersebut tersedia kolom tak terbatas untuk diisi dengan komentar dari pengguna lainnya, akan tetapi interaksi yang terjadi merupakan tanggapan biasa,

seperti halnya terjadi ketika mereka berinteraksi dalam sebuah komunikasi tatap muka. Menurut Nasrullah, hal itulah yang disebut sebagai virtual space. Sementara virtual sphere, lebih relevan terwujud melalui grup-grup diskusi maupun forum perbincangan politik sebagai respon atas realitas politik yang terjadi.

Bersatunya kondisi masyarakat ini membuat masyarakat baru yang dapat disebut masyarakat digital (*digital society*). Kondisi demikian menyebabkan masyarakat semakin mudah dan memiliki peluang yang lebih besar dalam mengakses berbagai informasi, terlebih lagi salah satu manfaat dari teknologi informasi yang mampu memampatkan keterbatasan ruang dan waktu. Masyarakat semakin dimanjakan dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat karena semakin mudah dan cepat dalam mengakses teknologi terbaru, maka penyebaran informasi juga semakin cepat.

Sebutan digital society telah melekat dengan sendirinya pada situasi masyarakat yang telah ada. Merupakan suatu kenyataan bahwa setiap individu mempunyai kebutuhan dan tuntutan terhadap teknologi informasi. Perkembangan dinamika kemanusiaan menempatkan perkembangan teknologi informasi dalam konteks digital society menjadi suatu kenyataan bahkan keharusan. Indonesia hanya membutuhkan beberapa dekade saja pascakemerdekaan untuk menciptakan digital society. Digital society merupakan masyarakat yang mampu mengaplikasikan teknologi informasi ke dalam kesehariannya. Tanda yang

signifikan dalam digital society saat ini adalah perkembangan yang sangat cepat pada sektor ilmu pengetahuan dan teknologi. Tantangan era digital di Indonesia utamanya yakni bangsa Indonesia harus berusaha menyetarakan atau mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan teknologi dunia, karena perkembangan teknologi dan informasi sangat pesat.<sup>25</sup>

Penulis memberikan penjelasan dalam tulisan ini tentang internet sebagai ruang public sebab dalam penggunaannya internet memiliki karakteristik yang sama dalam memahami konteks ruang public. Pemahaman mengenai internet sebagai ruang public baru berangkat dari konteks penelitian ini yang berfokus pada penerapan strategi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dalam *digital society*. Dimana *digital society* terbangun dalam masyarakat yang terhubung dengan internet. Sehingga konsep internet sebagai ruang public ini berkaitan dalam menjelaskan konsep *digital society* yang telah dulu dijelaskan.

## **2.5 Strategi Politik**

Strategi berasal dari bahasa Yunani klasik, yaitu "*stratos*" yang artinya tentara dan kata "*agein*" yang berarti memimpin. Dengan demikian, strategi dimaksudkan adalah memimpin tentara. Lalu muncul kata *strategos* yang artinya pemimpin tentara pada tingkat atas. Jadi, strategi adalah konsep militer yang bisa diartikan sebagai seni perang para

---

<sup>25</sup> Suyanto dan Gio Mohamad J, "Masyarakat Era Digital dan Pendidikan : Antara Peluang dan Tantangan", Jurnal pribadi dipublikasikan pada tahun 2018 di <https://www.researchgate.net/publication/322265378>

jenderal, atau suatu rancangan yang terbaik untuk memenangkan peperangan.

Dikemukakan oleh Karl Von Clausewitz yang merumuskan strategi sebagai suatu seni yang menggunakan sarana pertempuran untuk mencapai tujuan perang, sementara Martin – Anderson merumuskan strategi sebagai seni yang melibatkan kemampuan inteligensi/pikiran untuk membawa semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dengan memperoleh keuntungan yang maksimal dan efisien.<sup>26</sup> Strategi kemudian dikembangkan oleh para praktisi yang menghasilkan gagasan dan konsepsi yang didasari oleh keilmuan masing-masing.

Praktisi ilmu politik mencoba mendefinisikan strategi di dalam pertempuran politik. Strategi politik seperti pada semua pertempuran-pertempuran yang kompleks, setiap orang berlaku sesuai dengan rencana yang dipahami lebih dahulu, kurang lebih rencana yang sudah terolah dimana setiap orang membuat antisipasi bukan saja dalam serangan-serangannya, akan tetapi juga tentang jawaban-jawaban lawannya dan alat-alat untuk menyelesaikannya. Rencana perjuangan ini merupakan strategi; unsur-unsur yang berbeda yang ada di dalamnya, tindakan melawan musuh dan jawaban terhadap reaksinya merupakan taktik.

Strategi politik itu sendiri adalah sebuah cara yang telah dipahami dan disusun terlebih dahulu untuk merealisasikan cita-cita politik yang digunakan untuk perubahan jangka panjang. Perencanaan strategi politik

---

<sup>26</sup> Prof. Dr. Hafied Cangara, M.Sc, (2009), *Komunikasi Politik*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 292

merupakan suatu analisa yang jelas dari keadaan kekuasaan, gambaran yang jelas mengenai tujuan akhir yang akan dicapai dan pemusatan segala kekuatan untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Dalam pendeskripsian strategi politik, maka penulis merasa perlu untuk membatasi pada strategi politik yang digunakan untuk pemenangan pemilu dalam hal ini yakni strategi ofensif dan strategi defensif. Hal ini mengingat bahwa pemaknaan terhadap strategi politik tidak hanya pada pemenangan pemilu saja tetapi juga tentang sebuah perencanaan untuk kinerja sistem dalam struktur politik yang akan terbentuk. Kedua strategi inilah yang akan digunakan sebagai unit analisa dalam hal pemilihan strategi politik.

Dalam strategi politik dikenal strategi ofensif, strategi ini dibutuhkan apabila partai politik ingin meningkatkan jumlah pemilihnya, harus ada pandangan positif terhadap hal tersebut sehingga cara yang dapat digunakan adalah melalui kampanye politik. Strategi kampanye adalah suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan.<sup>27</sup>

Setiap kampanye politik adalah suatu usaha hubungan masyarakat. Tugasnya adalah membujuk sejumlah pemberi suara yang sudah terdaftar untuk mendukung calon. Kampanye yang berorientasi pada hubungan masyarakat, berusaha merangsang perhatian orang

---

<sup>27</sup> Toni, Efrizah, Kemal, (2006), *Mengenal Teori-Teori Politik*, Bandung: Penerbit Nuansa, hlm 187

kepada sang calon. Ia mencoba meningkatkan identifikasi dan citra partai atau calon di antara kelompok pemberi suara, menyebarluaskan pandangan partai atau calon tentang berbagai masalah penting, dan mendorong para pemberi suara menuju ke tempat pemilihan untuk memberikan suara kepada partai atau calon. Pada dasarnya strategi kampanye politik bertujuan untuk membentuk serangkaian makna politis tertentu di dalam pikiran para pemilih. Serangkaian makna politis yang terbentuk dalam pikiran para pemilih tersebut dimaksudkan untuk memilih kontestan tertentu. Makna politis inilah yang menjadi output penting dari strategi kampanye politik.

Dalam strategi kampanye politik yang digunakan untuk mempengaruhi pemilih, yang harus dijual atau ditampilkan adalah perbedaan terhadap keadaan yang berlaku saat itu serta keuntungan-keuntungan yang dapat diharapkan daripadanya sehingga dapat terbentuk kelompok pemilih baru di samping para pemilih yang telah ada. Oleh karena itu, harus ada penawaran baru atau penawaran yang lebih baik bagi para pemilih yang selama ini memilih partai pesaing. Oleh karena itu, dalam strategi seperti ini perlu dipersiapkan sebuah kampanye pengantar untuk menjelaskan kepada publik tentang penawaran mana saja yang lebih baik, dibandingkan dengan penawaran partai-partai lainnya dan memanfaatkan situasi dan kondisi yang terjadi dalam masyarakat. Misalnya hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam mensejahterakan hidupnya, dapat menjadi kunci untuk

merumuskan strategi ini. Partai politik harus lihai dalam melihat celah yang dapat membawa keuntungan bagi partai.

Selain itu, terdapat produk baru yang ditawarkan yaitu politik baru atau lebih tepatnya keuntungan yang dihasilkan politik baru tersebut perlu diiklankan atau disebarluaskan kepada masyarakat, misalnya melalui media massa. Produk politik yang dimaksud membutuhkan sesuatu yang baru atau deskripsi baru dari keuntungan yang ditawarkan sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik dalam mencapai sebuah target. Hal ini menyangkut adanya produk baru yakni program-program yang ditawarkan melalui pemasaran program yang dimiliki secara lebih baik dan peningkatan intensitas keselarasan antara program dan individu, seperti halnya memperbesar tekanan terhadap kelompok-kelompok target. Strategi defensif akan muncul ke permukaan, misalnya apabila partai pemerintahan atau koalisi pemerintahan yang terdiri atas beberapa partai ingin mempertahankan mayoritasnya. Selain itu, strategi defensif dapat muncul apabila sebuah pasar tidak akan dipertahankan lebih lanjut dan penutupan pasar ini diharapkan membawa keuntungan sebanyak mungkin

Penjelasan strategi politik ini menjadi acuan dalam penulis menganalisis strategi seperti apa yang digunakan oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dalam menghadapi pemilihan legislative 2019. Penulis ingin menganalisis bagaimana strategi yang digunakan oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem) melihat kondisi masyarakat dengan

munculnya fenomena *digital society*. Apakah fenomena yang muncul diakibatkan perkembangan teknologi ini dijadikan sebuah strategi oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Dengan adanya penjelasan strategi politik ini, penulis dapat menarik analisis terkait apakah penerapan strategi yang dilakukan oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem) efektif dan sejalan dengan penerapan *rational choice-theory*.

## **2.6 Telaah Pustaka**

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis, penelitian ini mencoba untuk menentukan posisi penulis meskipun kurangnya penelitian yang membahas fenomena calon tunggal dan rekrutmen partai dalam pemilu pada namun penulis harus tetap menentukan posisi agar terhindar dari kesamaan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Salah satu Penelitian yang dilakukan oleh Berliani Ardha Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta pada jurnal Visi Komunikasi Volume 13, No. 01, Mei 2014: 105-120 menggambarkan tentang Kekuatan media sosial untuk mempengaruhi masyarakat diberbagai aspek kehidupannya begitupun dengan politik. Penggunaan Alat media sosial itu harus direncanakan, di komunikasikan dan di program untuk meningkatkan kredibilitas partai. komunikasi organisasi adalah pertimbangan yang penting untuk memastikan cukup interaksi dalam platform media sosial. Dapat disimpulkan bahwa media sosial telah memainkan dan akan terus memainkan peran penting dalam kampanye

politik tahun 2014. Melalui platform seperti Facebook , Twitter , dan Youtube , kandidat politik akan terus berinteraksi dengan pendukung dan menerima dukungan dalam bentuk sumbangan dan relawan.

Skripsi Andi Dwi Wahyu Batari tentang kekuatan politik media sosial dalam pemenangan bupati dan wakil bupati pada pemilihan kepala daerah serentak kabupaten bulukumba tahun 2015. Skripsi ini membahas tentang Pemanfaatan / penggunaan media sosial oleh pasangan A. M. Sukri A. Sappewali dan Tomy Satria S.IP Terhadap Pemilih Pada Pilkada Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Bulukumba, dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa media social memiliki pengaruh yang relatif besar dalam kemenangan pasangan ini. Pengaruh yang dimaksud adalah kemudahan akses yang didapatkan oleh pasangan ini dalam merebut simpati dan perhatian dari masyarakat Bulukumba dengan pesan yang mereka buat dan disebarakan lewat media sosial.

Keseluruhan penelitian diatas menggambarkan tentang pemanfaatan media massa dalam pemilu. Berangkat dari hal tersebut penulis mencoba meneliti Bagaimana strategi partai politik khususnya DPW Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Sulawesi Selatan dalam menghadapi munculnya masyarakat digital yang memicu perubahan di masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi.

## 2.7 Kerangka Pemikiran

Perubahan yang sangat pesat diberbagai bidang kehidupan akibat lahirnya revolusi industry 4.0. Revolusi industry 4.0 yang bermula di bidang ekonomi ini mendistrupsi berbagai macam aspek kehidupan yang ada, baik itu dibidang politik, sosial, budaya. Perkembangan teknologi secara perlahan mengubah pola hidup manusia dan cara berinteraksinya antar sesama. Di tengah arus globalisasi yang tak terbendung, memberikan dampak yang luar biasa terhadap kehidupan sosial manusia. Tidak dapat dihindarkan pula, perubahan yang terjadi juga memberikan dampak yang luas pada pembangunan politik dan cara berpolitik masyarakat dunia khususnya di Indonesia.

Perubahan sosial ini menyentuh banyak segmen bidang tak terkecuali dalam bidang politik. Ini bisa dilihat dari fenomena politik yang terjadi hari ini. Indonesia sedang terjadi ledakan partisipasi politik. Tampak dari penggunaan media sosial seperti *facebook*, *twitter*, *instagram*, dan lainnya, yang berkaitan dengan konten politik. Ledakan ini tidak dapat dipisahkan dari dimulainya revolusi industri 4.0 yang menghadirkan masyarakat digital atau *digital society*. *Digital society* merupakan masyarakat baru yang terbentuk dari kemunculan internet yang saling menghubungkan banyak orang diberbagai tempat berbeda namun dapat berinteraksi pada satu waktu yang sama.

Fenomena yang terjadi ini membuat perubahan politik elektroral di Indonesia khususnya masyarakat dalam menentukan pilihannya. Partai

Nasional Demokrat (Nasdem) sebagai salah satu peserta pemilu 2019 apakah siap menghadapi perubahan tersebut. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sebagai salah satu peserta pemilu 2019 apakah melihat ini sebagai peluang dan strategi baru dalam meraup suara pemilih khususnya masyarakat yang sangat dekat dengan media sosial atau dapat disebut *digital society*.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana strategi partai politik khususnya calon legislatif menghadapi perubahan sosial yang terjadi di masyarakat akibat munculnya masyarakat digital. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *rational choice* (Pilihan Rasional) dan tinjauan partai politik, strategi politik, tinjauan tentang digital society dan internet sebagai ruang publik dalam menganalisis bagaimana partai politik membuat strategi politik dalam menghadapi masyarakat digital. Pada kesimpulan yang berusaha penulis capai strategi yang dilakukan partai politik khususnya calon legislatif dalam peningkatan suaranya di pemilihan legislatif 2019 Sulawesi Selatan khususnya dapil 1 dan 2.

## 2. 8 Skema Berpikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang perangkat-perangkat penelitian mulai dari pemilihan lokasi penelitian, tipe penelitian, teknik pengumpulan data, analisa data serta konsep operasional yang sangat membantu dalam kelangsungan penelitian ini.

#### **3.1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor DPW Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Sulawesi Selatan yang terletak di Makassar. Lokasi ini dipilih dengan alasan Sulawesi Selatan memiliki tingkat penetrasi pengguna internetnya sekitar 44 persen atau sekitar 3,7 juta masyarakat aktif menggunakan internet dari jumlah penduduk Sulawesi Selatan sebanyak 8,7 juta Jiwa.<sup>28</sup>

#### **3.2. Tipe dan Dasar Penelitian**

##### **3.2.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk menjelaskan secara deskriptif dari data yang diperoleh bagaimana Partai Nasional Demokrat (Nasdem) menghadapi perubahan politik electoral yang diakibatkan munculnya masyarakat digital. Dengan tipe penelitian ini penulis untuk mengetahui cara pandang Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dalam melihat perubahan sosial untuk diterapkan dalam sebuah strategi politik dalam meningkatkan suara. Penulis juga

---

<sup>28</sup> Diakses pada laman <https://tekno.tempo.co/read/700893/pengguna-internet-di-sulawesi-selatan-37-juta-orang/full&view=ok> pada tanggal 28 Februari 2019 pukul 23.14 Wita.

dapat melihat bagaimana respond dari masyarakat terhadap meningkatnya konten politik di media sosial agar penulis dapat mendeskripsikan keterkaitan antar semua komponen yang terlibat dalam penelitian ini.

### **3.2.2 Dasar Penelitian**

Menjelaskan strategi politik partai politik dalam memanfaatkan perubahan dalam masyarakat, penulis menggunakan dasar penelitian studi kasus (*case study*). Dalam penelitian ini penulis memilih studi kasus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dalam menghadapi pileg 2019 untuk melihat bagaimana strategi politik partai politik dalam memanfaatkan perubahan dalam masyarakat akibat dari adanya internet apa adanya sesuai dari data yang diperoleh penulis dalam menjelaskan penelitian ini. Penulis menggunakan dasar penelitian studi kasus (*case study*) dan memilih Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dengan alasan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) merupakan salah satu peserta pemilihan legislatif 2019 yang bersaing dengan partai lain dalam meraup suara masyarakat Indonesia dan menjadi partai yang memiliki perolehan suara yang terus meningkat disetiap pemilu.

### **3.3. Jenis Data Penelitian**

Jenis data yang di perlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut diperoleh melalui :

- 1) Data Primer, diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan, di mana wawancara tersebut tentunya berhubungan

dengan fokus penelitian. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara mendalam yang dilakukan dengan informan yang berkaitan dengan pemilihan legislatif 2019 khususnya terkait dengan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Sulawesi Selatan.

- 2) Data Sekunder sebagai pelengkap dan pendukung yang dimaksudkan untuk melengkapi data primer dan hasil dari penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca buku, tulisan-tulisan, dan juga literatur-literatur yang relevan dengan penelitian. Data sekunder merupakan data yang sudah di olah dalam bentuk naskah tertulis atau dokumen.

#### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam setiap proses penelitian, pengumpulan data bertujuan untuk mengungkapkan fakta mengenai perihal yang akan diteliti. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini digunakan beberapa metode yang dijadikan acuan untuk mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut :

- 1) Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara. Data yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara langsung dan terbuka sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan

atau orang yang diwawancarai. Dalam proses ini, peneliti semaksimal mungkin berusaha untuk menciptakan suasana yang betul betul *rileks* (suasana keakraban) dengan informan. Dengan harapan, informan bisa memaparkan secara lengkap, jelas, dan terperinci apa yang nantinya ditanyakan oleh peneliti kepada informan.

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan mewawancarai informan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) agar wawancara tetap berada pada fokus penelitian, yakni bagaimana strategi partai politik dalam menghadapi perubahan sosial masyarakat yang diakibatkan oleh munculnya masyarakat digital meski tidak menutup kemungkinan terdapat pertanyaan-pertanyaan berlanjut. Informan yang dipilih adalah informan yang benar-benar paham dan mengetahui permasalahan yang dimaksud. Adapun yang menjadi informan adalah:

<p>1. Sekertaris DPW Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Sulawesi Selatan. (H. Syahrudin Alrif, S.IP, MM)</p>	<p>Data yang didapatkan dari informan yakni kebijakan atau arahan partai dalam penggunaan/pemanfaatan media digital untuk berkampanye.</p>
<p>2. Ketua Bapillu DPW Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Sulawesi Selatan. (Irfan Jaya)</p>	<p>Data yang didapatkan dari informan yakni apa saja pertimbangan dalam hal memilih calon legislatif serta apakah ada hubungannya</p>

	pemilihan bakal calon anggota legislatif terhadap pengetahuannya dalam hal penguasaan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Wakil Ketua Bidang Komunikasi DPW Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Sulawesi Selatan. (Arum Spink)	Data yang didapatkan dari informan yakni mengenai efektifitas penggunaan media social dalam peningkatan suara partai.
4. Beberapa caleg Partai Nasional Demokrat (Nasdem). a. Andre Prasetyo Tanta b. Drg. Rachmatika Dewi c. Rezki Mulfiati Lutfi d. H. Irwan e. Rakhmat Kasjim	Data yang didapatkan dari informan yakni menyangkut penggunaan media social dalam menyangkau pemilih dan peningkatan suara di dapilnya.

## 2) Studi Pustaka

Dengan membaca sumber-sumber atau literatur mengenai partai politik dan strategi politik, media sosial, serta literatur-literatur lainnya yang menyangkut objek penelitian.

### 3) Observasi

Peneliti ini mencoba terjun langsung kelapangan dan bergabung dengan orang-orang yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### 4) Studi Media Online

Metode penelusuran data online adalah tata cara melakukan penelusuran data melalui media online seperti internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas online, sehingga memungkinkan peneliti dapat memanfaatkan data – informasi yang berupa data maupun informasi teori, secepat atau semudah mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan layanan internet dengan cara membuka alamat mesin pencari (*search engine*), kemudian membuka alamat *Web-site* yang berhubungan dengan kebutuhan penelitian.

## 3.5. Teknik Analisa Data

Analisa merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam kegiatan penelitian, terutama bila diinginkan generalisasi atau untuk memperoleh kesimpulan yang tegas dari hasil penelitian yang dilakukan. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, hal ini dimaksudkan agar tetap berada pada fokus penelitian. Penulis menggambarkan masalah yang terjadi menggunakan argumen yang jelas dan memfokuskan perhatian pada pengumpulan data serta informasi melalui observasi dan wawancara mendalam. Data-data dari hasil wawancara dan pengamatan (observasi) sehari-hari dicatat

secermat, serinci mungkin dan dikumpulkan sehingga menjadi suatu catatan lapangan atau *field notes*. Selanjutnya data dan informasi tersebut dianalisa secara kualitatif sehingga apa yang terkandung dalam realitas dapat segera mungkin diungkap. Karena analisis penelitian ini bersifat kualitatif, maka penyajian data disajikan dalam bentuk narasi yaitu berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan realitas politik yang ada dalam media sosial.

Proses analisis data secara keseluruhan dengan menggelar seluruh data mentah yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan atau observasi yang ditulis dalam catatan lapangan dan dokumentasi. Data tersebut kemudian dibaca, dipelajari, ditelaah, kemudian direduksi atau dipilih sesuai dengan kategori-kategori tertentu (semisal, tema, topik) menentukan batas-batas permasalahan sehingga mendapatkan gambaran yang jelas.

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. Selanjutnya, mengabstraksikan data tersebut dengan berpegang pada keaslian data. Hasil dari abstraksi kemudian dianalisa berdasarkan kerangka pemikiran, konsep-konsep, teori-teori yang digunakan kemudian dideskripsikan, setelah itu baru diinterpretasikan.

## **BAB IV**

### **GAMBAR UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian mengenai “Perubahan Politik Elektoral dan Strategi Menghadapinya (Studi Kasus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dalam Menghadapi Pemilu Legislatif 2019)”. Penelitian ini berlangsung di kantor DPW Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Sulawesi Selatan di Jalan Bontolempangan No. 17, kota Makassar.

#### **4.1 Sulawesi Selatan**

Secara astronomis, Sulawesi Selatan terletak antara 0° 12' Lintang Selatan dan 8° Lintang Selatan dan antara 116° 48' – 122° 36' Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 00. Berdasarkan posisi geografisnya, provinsi Sulawesi Selatan memiliki batas-batas: Utara – Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah; Selatan – Laut Flores; Barat – Selat Makassar; Timur – Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan letak geografisnya, Sulawesi Selatan mempunyai dua kabupaten kepulauan, yaitu Kepulauan Selayar dan Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep).<sup>29</sup>

Sulawesi Selatan terdiri dari 24 kabupaten/kota yang terdiri dari ada 21 kabupaten dan 3 kota, yaitu: Kabupaten: Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Gowa, Sinjai, Maros,

---

<sup>29</sup> Sulawesi Selatan dalam Angka 2019. BPS Sulawesi Selatan. Hal. 3

Pangkep, Barru, Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Enrekang, Luwu, Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara Dan Kota: Makassar, Parepare, Palopo.

#### 4.1.1 Jumlah Penduduk Sulawesi Selatan

Jumlah penduduk Sulawesi Selatan menurut data Badan Pusat Strategis Sulawesi Selatan tahun 2018 sebanyak 8.771.970 jiwa. Sementara itu jumlah penduduk tertinggi di provinsi Sulawesi Selatan ialah kota Makassar dengan jumlah 1.508.154 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada di Kepulauan Selayar dengan jumlah penduduk 134.280 jiwa. Dengan rincian jumlah laki-laki 4.286.893 jiwa dan perempuan 4.485.077 jiwa.<sup>30</sup>

Tabel. 4.1. Jumlah penduduk berdasarkan kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk
1.	Kepulauan Selayar	134.280
2.	Bulukumba	418.326
3.	Bantaeng	186.612
4.	Jeneponto	361.793
5.	Takalar	295.892
6.	Gowa	760.607
7.	Sinjai	242.672
8.	Maros	349.822

<sup>30</sup> *Ibid.* Hal. 64-65

9.	Pangkep	332.674
10.	Barru	173.623
11.	Bone	754.894
12.	Soppeng	226.770
13.	Wajo	396.810
14.	Sidrap	299.123
15.	Pinrang	374.583
16.	Enrekang	204.827
17.	Luwu	359.209
18.	Tana Toraja	232.821
19.	Luwu Utara	310.470
20.	Luwu Timur	293.822
21.	Toraja Utara	229.798
22.	Makassar	1.508.154
23.	Parepare	143.710
24.	Palopo	180.678
Total		8.771.970

Sumber : Data BPS Sulawesi Selatan, Provinsi Sulsel dalam angka 2019

#### 4.1.2 Jumlah Daftar Pemilih Tetap Sulawesi Selatan

Jumlah daftar pemilih tetap Sulawesi Selatan dari data Komisi Pemilihan Umum Daerah Sulawesi Selatan yang di tetapkan pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil

Perbaikan Ketiga (DPTHP 3) sebanyak 6.173.200 pemilih.<sup>31</sup> Dengan rincian jumlah pemilih tetap di 24 kabupaten/kota sebagai berikut :

**Tabel. 4.2. Jumlah pemilih tetap berdasarkan kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.**

<b>No.</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pemilih Tetap</b>
1.	Kepulauan Selayar	91.610
2.	Bulukumba	321.503
3.	Bantaeng	144.383
4.	Jeneponto	267.762
5.	Takalar	203.975
6.	Gowa	529.870
7.	Sinjai	181.357
8.	Maros	245.041
9.	Pangkep	243.096
10.	Barru	129.687
11.	Bone	543.646
12.	Soppeng	180.685
13.	Wajo	288.244
14.	Sidrap	215.397
15.	Pinrang	266.081
16.	Enrekang	152.636
17.	Luwu	255.825

<sup>31</sup> Diakses pada laman <https://kumparan.com/makassar-indeks/hasil-dpthp-3-ini-jumlah-pemilih-di-provinsi-sulsel-1554363312827365491> pada tanggal 16 September pada pukul 00.28 Wita

18.	Tana Toraja	162.655
19.	Luwu Utara	216.147
20.	Luwu Timur	189.449
21.	Toraja Utara	156.514
22.	Makassar	967.590
23.	Parepare	99.111
24.	Palopo	107.111

Sumber : Data sulsel.kpu.go.id

#### 4.1.3 Pembagian Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Pemilihan legislatif DPR-RI Sulawesi Selatan dibagi atas 3 dapil yakni dapil 1 meliputi Bantaeng, Jeneponto, Talakar, Gowa, Kota Makassar dan Kepulauan Selayar dengan memperebutkan 8 kursi. Dapil 2 meliputi Bulukumba, Sinjai, Bone, Soppeng, Wajo, Parepare, Barru, Pangkep, Maros dengan memperebutkan 9 kursi. Dan yang terakhir dapil 3 meliputi Sidrap, Enrekang, Luwu, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu Utara, Luwu Timur, Pinrang, Palopo yang memperebutkan 7 kursi.

Pemilihan legislatif DPRD Sulawesi Selatan dibagi menjadi 11 daerah pemilihan yang meliputi :<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Diakses pada laman <https://makassar.tribunnews.com/2018/10/21/tribunwiki-total-kursi-dpr-dprd-provinsi-dan-kabupatenkota-di-sulsel> pada tanggal 16 September 2019 pukul 01.03 Wita

Tabel. 4.3. **Pembagian kursi dan dapil DPRD Sulawesi Selatan.**

<b>Daerah Pemilihan</b>	<b>Nama daerah</b>	<b>Jumlah kursi</b>	<b>Jumlah Pemilih Tetap</b>
I	Kota Makassar: Rappocini, Makassar, Ujung Tanah, Ujung Pandang, Sangkarrang, Bontoala, Tallo, Tamalate, Mariso, Mamajang, Wajo	9	580.003
II	Kota Makassar: Panakkukang, Manggala, Tamalanrea, Biringkanaya	6	387.587
III	Takalar, Gowa	9	733.845
IV	Jeneponto, Bantaeng, Kepulauan	7	503.755

	Selayar		
V	Bulukumba, Sinjai	6	502.860
VI	Maros, Pangkep, Barru, Parepare	9	716.935
VII	Bone	7	543.646
VIII	Soppeng, Wajo	7	468.929
IX	Sidrap, Pinrang, Enrekang	9	634.114
X	Tana Toraja, Toraja Utara	5	319.169
XI	Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Kota Palopo	11	768.532

*Sumber : Data sulsek.kpu.go.id*

#### **4.2 Sejarah Partai Nasional Demokrat (Nasdem)**

Nasdem dideklarasikan pada 26 Juli 2011 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta. Partai Nasdem sendiri telah mendaftar ke Kemenkumham sejak tanggal 6 april 2011 guna keperluan pendaftaran Pemilu Legislatif 2014 sesuai dengan revisi Undang-Undang No.2 2008 tentang Partai Politik.

Partai NasDem awalnya dimotori oleh tiga orang yang juga bergabung pada Ormas Nasional Demokrat yaitu Patrice Rio Capella, Ahmad Rofiq dan Sugeng Suparwoto. Patrice Rio Capella sebelumnya adalah Wakil Sekjen DPP Partai Amanat Nasional yang sebelumnya tercatat sebagai Wakil Ketua DPRD Propinsi Bengkulu tahun 2004-2009.

Ahmad Rofiq adalah mantan Sekjen Partai Matahari Bangsa (PMB) yang merupakan partai politik peserta Pemilu Legislatif 2009 namun tidak masuk parliamenterly threshold karena hanya mendapatkan 0,40% suara. Sedangkan Sugeng Suparwoto merupakan Dewan Redaksi Media Group. Ahmad Rofiq menegaskan bahwa, partai yang didaftarkan di Kementrian Hukum dan HAM itu bukanlah Ormas Nasional Demokrat yang dipimpin Surya Paloh. Ormas Nasional Demokrat masih berjalan dan tidak membentuk atau berubah menjadi partai.<sup>33</sup> Partai Nasdem digagas oleh orang-orang muda yang ada di ormas Nasional Demokrat. Partai Nasdem bukanlah bentukan dari dari ormas melainkan inisiatif dari para anggotanya saja.

#### **4.2.1 Visi Misi Partai Nasional Demokrat (Nasdem)**

Kelahiran Partai Nasdem bukanlah semata-mata hadir dalam percaturan kekuasaan dan pergesekan kepentingan. Partai Nasdem berazaskan Pancasila. Adapun visi partai Nasdem :

---

<sup>33</sup> Diakses pada laman [www.matanews.com](http://www.matanews.com) pada tanggal 16 September 2019 pukul 01.49 Wita.

*“Indonesia yang merdeka sebagai negara bangsa, berdaulat secara ekonomi, dan bermartabat dalam budaya.”<sup>34</sup>*

Partai Nasdem bertujuan menggalang dan kesadaran masyarakat untuk melakukan gerakan perubahan untuk Restorasi Indonesia. Restorasi Indonesia adalah gerakan mengembalikan Indonesia kepada tujuan dan cita-cita proklamasi 1945. Adapun misi Partai Nasdem.

1. Membangun Politik Demokratis berkeadilan berarti menciptakan tata ulang demokrasi yang membuka partisipasi politik rakyat dengan cara membuka akses masyarakat secara keseluruhan. Mengembangkan model pendidikan kewarganegaraan untuk memperkuat karakter bangsa, serta melakukan perubahan menuju efisiensi sistem pemilihan umum. Memantapkan reformasi birokrasi untuk menciptakan sistem pelayanan masyarakat. Melakukan reformasi hukum dengan menjadikan konstitusi UUD 1945 sebagai kontrak politik kebangsaan.
2. Menciptakan Demokrasi Ekonomi. Melalui tatanan demokrasi ekonomi maka tercipta partisipasi dan akses masyarakat dalam kehidupan ekonomi negara, termasuk di dalamnya distribusi ekonomi yang adil dan merata yang akan berjuang pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam mewujudkan cita-cita ini maka perlu untuk mendorong penciptaan lapangan

---

<sup>34</sup> Buku Panduan Partai Nasdem. BAB II Pasal 4 Anggaran Dasar Partai. Hal. 35

kerja, sistem jaminan sosial nasional, penguatan industri nasional, serta mendorong kemandirian ekonomi di level lokal.

3. Menjadikan budaya gotong royong sebagai karakter bangsa.<sup>35</sup>

#### **4.3 Gambaran Umum DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan**

Secara khusus penulis melihat Partai Nasdem di Sulawesi Selatan, yakni pada Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Nasdem Sulawesi Selatan yang beralamatkan di Jalan Bontolempangan No. 17, kota Makassar. Struktur Pengurus DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan periode 2016-2019 adalah sebagai berikut :

Di awal terbentuknya Partai NasDem di Sulawesi Selatan digagas oleh sekelompok Anak Muda, namun pembentukan awal tidaklah semulus Ormas Nasional Demokrat yang di Back Up oleh beberapa tokoh di Sulawesi Selatan, Partai NasDem lahir dari buah karya anak muda sulawesi selatan yang sama sekali bukan tokoh dan memang tidak di back up oleh tokoh ataupun pengusaha, namun dengan niat dan semangat yang kokoh membuat anak muda tersebut sepakat untuk mewujudkan cita-cita Restorasi melalui partai NasDem. Maka dimulailah pertemuan kecil-kecilan dari Warkop ke warkop dan dalam waktu yang singkat struktur ditingkat Dewan Pimpinan Wilayah dapat diselesaikan yang berjumlah 11 orang.

---

<sup>35</sup> Buku Panduan Partai Nasdem. BAB II Pasal 5 Anggaran Dasar Partai. Hal. 35-36

Bermodalkan jaringan pertemanan dan keluarga 11 orang pengurus tersebut mengadakan jalinan komunikasi kesemua Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, dari orang ke orang partai ini ditawarkan, namun ternyata tidak semua orang tertarik dengan Partai NasDem yang pada waktu itu masih simpang siur apakah betul akan menjadi Parpol atau tidak dan kurang lebih 2 minggu 4 Kabupaten rampung struktur kepengurusannya, bermodalkan struktur kepengurusan ditingkat wilayah dan 4 struktur di Kab/Kota tersebut oleh Sanusi Ramadhan berangkat ke Jakarta untuk menerima SK dari DPP Partai NasDem yang saat tersebut dinahkodahi oleh H. Patriece Rio Capela, dan dalam waktu 1 minggu akhirnya SK pun terbit dan menjadi Insulin semangat bagi kepengurusan DPW Sulsel dalam merampungkan struktur di 24 kabupaten kota di provinsi Sulawesi Selatan.

Struktur Pengurus DPW Partai NasDem Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :<sup>36</sup>

### **Dewan Pimpinan Wilayah Sulawesi Selatan**

Ketua : Rusdi Masse

Sekretaris : Syaharuddin Alrif

Wakil Sekretaris : Agung Sucipto

Wakil Sekretaris : Abdul Kadir

---

<sup>36</sup> Profil dokumen DPW NasDem Sul-Sel 2016/2019.

Bendahara : Ferry T

Wakil Bendahara Bidang Penggalangan Dana : Imelda

Wakil Bendahara Bidang Pengelola Aset : H Sadaruddin

Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan : Raymond Affandy

Wakil Ketua Bidang Komunikasi : M. Rajab

Wakil Ketua Bidang Politik dan Kebudayaan : A Sukri Sappewali

Wakil Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan : Judas Amir

Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi HAM : Hasan Usman

Wakil Ketua Bidang Otonomi Daerah : Ince Langke

Wakil Ketua Bidang Pertanian Maritim : Lutfi Halide

Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat: Tenri Olle Yasin Limpo

Wakil Ketua Bidang Energi dan SDM : David Pajung

Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Daerah : Dahlan Gege

Wakil Ketua Bidang Ekonomi : Arwan Tjahaydi

Wakil Ketua Bidang Olahraga Pemuda dan Mahasiswa : Rudi Lallo

Wakil Sekretaris Bidang Kepengurusan Kaderisasi : Ir Asrullah

Wakil Sekretaris Bidang Internal dan Kesekretariatan : Abbas Badan

**Pemenangan Pemilu :**

Ketua : Irfan Jaya

Sekretaris : Aminuddin Sukardi

DPW Partai Nasional Demokrat Sulawesi Selatan membawahi 21 DPD tingkat Kabupaten dan 3 DPD tingkat kota yang tersebar di seluruh provinsi Sulawesi Selatan.<sup>37</sup>

**Tabel. 4.4. Daftar ketua DPD Nasdem di 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Ketua</b>
Bantaeng	Na'ma Abbas
Barru	Suardi Saleh
Bone	H. Sultani
Bulukumba	Tomy Satria Yulianto
Enrekang	Asman S.E
Gowa	Azhar Usman
Jeneponto	Baharuddin Kain
Selayar	Ady Ansar
Luwu	H. M Judas Amir
Luwu Timur	Irwan Bachri Syam
Luwu Utara	Chalik Mawardi
Palopo	Abd. Rauf

<sup>37</sup> Profil dokumen DPW NasDem Sul-Sel 2016/2019.

Maros	Harmil Mattotorang
Makassar	Andi Rachmatika Dewi
Pangkep	Muhammad Yusran Lalogau
Parepare	A. Faisal Andi Sapadda
Pinrang	Faizal Tahir Sarkawi
Sidrap	Samsumarlin
Sinjai	Andi Jusman
Soppeng	Andi Zulkarnaen Soetomo
Takalar	Sayyed Muhajir
Tana Toraja	Evivana Rombe Datu
Toraja Utara	Yosia Rintu
Wajo	Andi Gusti Makkarodda

*Sumber : Profil Dokumen Partai Nasdem*